



IDN/ANTARA

MENLU TIONGKOK ADAKAN PEMBICARAAN DENGAN MENLU IRLANDIA

Menlu Tiongkok Wang Yi yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, mengadakan pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri dan Menlu Irlandia Micheal Martin di Beijing, Selasa (7/11). Kerja sama Tiongkok-Irlandia mendorong kemitraan strategis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Konflik Sudan Makin Parah, Milisi RSF Lancarkan Pembersihan Etnis

Perang di Sudan telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dan lebih dari enam juta orang mengungsi, menurut Organisasi IOM.

SUDAN (IM) -Orang-orang yang melarikan diri ke Chad melaporkan lonjakan baru pembunuhan dalam konflik Sudan yang dipicu oleh etnis di Darfur Barat Sudan ketika Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mengambil alih pangkalan militer utama di ibu kota negara bagian, El Geneina.

Pada pembicaraan di Jeddah, pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk memfasilitasi pengiriman bantuan dan langkah-langkah membangun kepercayaan, kata mediator pada Selasa, namun upaya untuk mencapai gencatan senjata sejauh ini gagal.

Serangan terhadap pangkalan militer di Ardamata dimulai awal pekan lalu, ketika milisi juga mulai menembaki rumah-rumah di kamp pengungsi, kata Nabil Meccia, seorang perawat yang mengatakan bahwa dia telah menyeberang ke Chad setelah ditahan oleh RSF di perbatasan dan membayar untuk mengamankan pembebasannya.

Dia mengatakan dia telah

melihat pasukan RSF membunuh warga sipil ketika mereka melepaskan tembakan selama penggerebekan di kamp Ardamata, dan menggiring orang-orang serta mengeksekusi mereka. Seperti warga lainnya, Meccia telah pindah ke Ardamata, tempat warganya mengharapkan perlindungan dari tentara, setelah serangan di tempat lain di El Geneina tahun ini.

Seorang tentara yang menolak disebutkan namanya, yang melarikan diri dari pangkalan Ardamata, mengatakan serangan drone pada Jumat pagi telah menghancurkan pertahanannya dan para komandan militer telah pergi pada Sabtu pagi.

Ketika pasukan militer keluar dari markas mereka, para pemimpin masyarakat di Ardamata mengumpulkan senjata untuk mencoba mengamankan jalan bagi warga sipil, kata Meccia dan Sharaf Eddin Adam, pengungsi sipil lainnya yang tiba di Chad.

Warga yang memiliki akses terhadap kendaraan berhasil melarikan diri, namun yang

lainnya ditangkap atau dipaksa bekerja keras oleh RSF sebelum puluhan orang diantre dan dieksekusi di distrik Kobri di Ardamata tepat setelah tengah hari pada Minggu (5/11) lalu, kata Adam.

Dia mengatakan dia melihat puluhan mayat warga sipil tergeletak tak bernyawa di jalan dan orang-orang juga dipukul dan dicambuk.

Perang di Sudan telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dan lebih dari enam juta orang mengungsi, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Lebih dari 500.000 orang telah menyeberang ke Chad, sebagian besar dari Darfur Barat, kata IOM.

Badan amal medis MSF mengatakan jumlah pengungsi yang tiba di Chad meningkat tajam dalam tiga hari pertama bulan November menjadi 7.000 orang. Para pengungsi tersebut sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan banyak dari mereka menceritakan kisah kekerasan skala besar terhadap warga sipil, katanya.

Pejabat PBB di Chad mengatakan ribuan orang lainnya diperkirakan akan menyeberang namun dicegah oleh pasukan RSF yang meminta uang

Saksi lainnya, Mashaar Omar Ahmed, mengatakan milisi dan pasukan RSF, beberapa di antaranya berpakaian sipil dan beberapa lainnya ber-seragam, telah mengeksekusi lebih dari 30 pria di Distrik B Ardamata setelah memisahkan mereka dari para wanita.

“Mereka bertanya kepada laki-laki tersebut apakah mereka Masalit, dan mereka tidak menyangkalnya,” katanya sambil menggendong putrinya yang berusia 6 bulan. Dia mengatakan 10 anggota keluarganya telah hilang sejak Minggu.

Sarah Adam Idris, 30 tahun yang mengatakan suaminya, saudara kandung dan laki-laki lain di keluarganya hilang setelah serangan itu, mengatakan para penyerang telah menyerbu kamp pengungsi di Ardamata pada Minggu pagi. Meskipun para pemimpin suku mencari jaminan perjalanan yang aman, RSF telah menyerbu, membakar dan menjarah rumah-rumah, membunuh banyak orang, katanya.

Tentara tersebut mengatakan bahwa ketika dia tiba di perbatasan dengan Chad, dia berpura-pura menjadi warga sipil dan menyalak bahwa dia adalah Masalit agar bisa lewat. Seorang pria lain dibawa pergi setelah penjaga

perbatasan RSF menemukan foto dirinya berseragam tentara di teleponnya, kata tentara itu.

Abdel Karim Rahman Yacoub, seorang sopir truk yang berhasil mencapai Chad setelah berpura-pura bukan Masalit, mengatakan dia melihat RSF membunuh dua pria lainnya berdasarkan identitas mereka.

Prajurit Angkatan Darat Malik Adam Mattar Ibrahim, 42, mengatakan dia telah melarikan diri dari Ardamata dengan konvoi setidaknya 15 kendaraan yang membawa pejuang dan warga sipil yang diserang RSF dengan granat berpenero roket ketika mencoba mencapai Chad melalui rute yang lebih panjang melalui pegunungan. Hanya dua dari 27 orang yang berada di dalam kendaraannya yang lolos, katanya.

Toby Harward, pejabat senior PBB untuk Darfur, menggambarkan laporan dan gambar yang muncul dari Ardamata sebagai hal yang “memuakkan”. Dia mengimbau dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bagi mereka yang memiliki otoritas untuk melindungi warga sipil dan memberikan akses kemanusiaan tanpa batas. **tom**

Parlemen Turki Boikot Coca Cola dan Nestle karena Dukung Israel

ANKARA (IM) -Ankara - Parlemen Turki mencoret produk-produk Coca Cola dan Nestle dari restoran yang ada di kompleks gedung parlemen, terkait dugaan kedua perusahaan itu mendukung Israel dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (8/11), langkah itu tertuang dalam pernyataan resmi yang dirilis parlemen Turki dan keterangan seorang sumber yang menyebut langsung nama kedua perusahaan yang produknya diboykot.

Kedua perusahaan yang dimaksud belum memberikan tanggapan resmi atas langkah parlemen Turki tersebut.

Dengan langkah ini, maka produk-produk Coca Cola dan Nestle akan dihilangkan dari daftar menu restoran dan kafetaria di kompleks gedung parlemen Turki mulai Selasa (7/11) waktu setempat.

“Diputuskan bahwa produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel tidak akan dijual di restoran, kafetaria, dan kedai teh di kampus parlemen,” demikian bunyi pernyataan parlemen Turki, yang menyebut keputusan itu diambil oleh Ketua Parlemen Turki Numan Kurtulmus.

Pernyataan resmi parlemen Turki itu tidak menyebut secara langsung nama produk yang dihapus dari daftar menu. Namun seorang sumber di parlemen Turki menyebut produk minuman Coca Cola dan kopi instan Nestle menjadi produk yang dihapus dari menu.

Menurut sumber tersebut, keputusan itu diambil sebagai respons atas tuntutan masyarakat.

“Kantor Ketua Parlemen tidak tinggal diam terhadap kemarahan publik dan memutuskan untuk menghapus produk-produk perusahaan tersebut dari menu kafe dan restoran di parlemen,” sebut sumber tersebut.

Kedua perusahaan itu telah disebutkan dalam postingan media sosial dalam beberapa hari terakhir oleh para aktivis Turki yang menyerukan boikot terhadap barang-barang Israel dan perusahaan-perusahaan Barat yang mereka anggap mendukung Israel.

Pemerintah Turki dengan tegas mengkritik pengepungan Israel terhadap Jalur Gaza dan dukungan Barat untuk Israel. Selama sebulan terakhir, Israel terus membombardir Jalur Gaza untuk merespons serangan menghejutkan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Menurut otoritas Israel, sekitar 1.400 orang yang sebagian besar warga sipil tewas akibat serangan Hamas. Para pejabat Tel Aviv juga menyebut lebih dari 240 orang, yang tidak hanya terdiri atas warga sipil dan tentara Israel tapi juga warga negara asing, disandera oleh Hamas dan dibawa ke Jalur Gaza.

Sementara laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut lebih dari 10.300 orang, sebagian besar warga sipil dan nyaris separuhnya anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

Ratusan ribu warga Turki turun ke jalanan beberapa waktu terakhir untuk memprotes serangan Israel terhadap Jalur Gaza. Protes untuk Israel juga marak disampaikan via media sosial. **tom**

WHO Sebut Beberapa Dokter Lakukan Operasi Tanpa Anestesi di Gaza, Termasuk Amputasi

GAZA (IM) - Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan beberapa dokter di Gaza telah melakukan operasi, termasuk amputasi, tanpa anestesi.

“Tidak ada yang bisa membenarkan kengerian yang dialami warga sipil di Gaza,” kata juru bicara WHO Christian Lindmeier pada Selasa (7/11) dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss.

Lindmeier menegaskan kembali seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk akses tanpa hambatan, aman dan terjamin untuk sekitar 500 truk bantuan setiap hari.

Tidak hanya melintasi perbatasan tetapi juga sampai ke pasien di rumah sakit, di mana operasi termasuk amputasi dilakukan dilakukan tanpa anestesi.

Dia menjelaskan tingkat kematian dan penderitaan sulit untuk dipahami. Lindmeier juga mengatakan bahwa 16 petugas kesehatan telah terbunuh saat bertugas, dan menekankan bahwa segala serangan terhadap layanan kesehatan dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional.

Namun, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pada Selasa (7/11) bahwa konvoi kemanusiaan mendapat kecaman ketika mengirimkan pasokan

medis penting ke fasilitas kesehatan di Kota Gaza.

Menurut ICRC, dua truk rusak dalam serangan tersebut, dan seorang pengemudi mengalami luka ringan.

“Kondisi seperti ini tidak bisa dilakukan oleh personel kemanusiaan,” kata William Schomburg, ketua delegasi ICRC di Gaza, dalam sebuah pernyataan.

“Kami di sini untuk memberikan bantuan mendesak kepada warga sipil yang membutuhkan. Memastikan bahwa bantuan penting dapat mencapai fasilitas medis adalah kewajiban hukum berdasarkan hukum humaniter internasional,” lanjutnya. **ans**



XINHUA

PEKAN DIGITAL BENIN 2023 DI COTONOU

Pegunjung stan pameran Pekan Digital Benin 2023 di Cotonou, Benin, Selasa (7/11). Pekan Digital Benin 2023 bertujuan untuk meningkatkan transformasi dan inklusi digital di negara tersebut.

Menteri Afrika Selatan Dirampok di Jalan Raya

AFSEL (IM) - Parah! Seorang menteri Afrika Selatan (Afsel) dirampok dan para polisi pengawalnya pun dicuri senjatanya.

Kepolisian Afsel menyebut perampokan pejabat tinggi pemerintah ini sebagai “insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya” di negara yang rawan kejahatan itu.

Insiden itu terjadi pada hari Senin (6/11) waktu setempat, ketika Menteri Transportasi Sindiwe Chikunga sedang berkendara di jalan raya selatan kota Johannesburg, kata polisi.

“Barang-barang pribadi dan dua pistol SAPS (Dinas Polisi Afrika Selatan) dicuri,” kata juru bicara polisi Athlenda Mathe, seperti dikutip kantor berita AFP, Rabu (8/11).

“Perburuan telah dilakukan menyusul insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Media lokal memberitakan, kendaraan yang di-

tumpangi menteri sempat berhenti untuk mengganti ban yang bocor saat perampokan terjadi.

Melibatkan seorang pejabat tinggi dengan para pengawal bersenjata, insiden ini sangat mengejutkan, bahkan untuk standar Afrika Selatan.

Negara ini telah lama mempunyai reputasi kejahatan dengan kekerasan, dan sering digambarkan sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia di luar zona perang.

Pihak berwenang dianggap gagal menjamin keselamatan dan keadilan bagi korban kejahatan.

“SAPS berkomitmen untuk melaksanakan mandatnya untuk melindungi eksekutif negara dan masyarakat secara luas,” kata Mathe.

“Perlindungan VIP adalah salah satu area prioritas utama SAPS dan telah dilakukan dengan sangat baik selama bertahun-tahun,” tandasnya. **gul**

Israel Bekali Warga Sipil dengan Senjata Api

TEL AVIV (IM) - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengatakan puluhan ribu izin kepemilikan senjata telah diberikan kepada warga di negaranya.

Hal itu diumumkan ketika aksi kekerasan pemukim Yahudi Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat sejak pecahnya pertempuran di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu.

“Divisi Senjata Api menerima ratusan ribu permintaan izin senjata pribadi, dan kami telah mengeluarkan puluhan ribu izin bersyarat dan izin sebenarnya untuk senjata pribadi kepada warga yang memenuhi syarat,” ungkap Ben-Gvir, Rabu (8/11), dikutip laman Middle East Monitor.

Ben-Gvir tak menjelaskan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan izin bersyarat. Dia hanya mengatakan bahwa pendistribusian senjata api tersebut bertujuan melindungi warga Israel dari serangan.

Ben-Gvir menambahkan, saat ini ratusan kelas cadangan baru telah dibuka di seluruh Israel.

Ben-Gvir mengatakan, tujuan dari pembukaan kelas-kelas tersebut adalah untuk mengajari warga Israel cara membawa dan menggunakan senjata api.

Dia menyebut, saat ini Pemerintah Israel juga sudah menambah puluhan staf di Divisi Senjata Api.

“Karena tingginya permintaan di Divisi Senjata Api, saya menghimbau semua orang untuk bersabar. Periks kelayakan Anda dan persenjatai diri Anda sendiri,” ucap tokoh yang dikenal anti-Arab tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, Ben-Gvir telah mengunggah foto dan video yang menunjukkan dirinya tengah mendistribusikan senjata api kepada warga Israel di wilayah utara, selatan, dan Tepi Barat. Warga Palestina khawatir, kebijakan Is-

rael mempersenjatai warganya mungkin menjadi dalih untuk melakukan pembunuhan dengan kedok “mencegah serangan”.

Menurut PBB, sejak pecahnya pertempuran antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, aksi kekerasan pemukim Yahudi Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat.

“Selama sebulan terakhir, PBB mencatatkan terjadinya 202 kasus aksi penyerangan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina. Sebanyak 28 kasus mengakibatkan korban luka, 141 kasus menyebabkan kerusakan properti, dan 33 kasus lainnya menimbulkan korban luka serta kerusakan properti.

“Ini mencerminkan rata-rata tujuh insiden harian, dibandingkan dengan tiga insiden sejak awal tahun ini. Lebih dari sepertiga insiden ini mencakup ancaman senjata api, termasuk penembakan,” kata PBB terkait lonjakan kekerasan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dikutip laman Aljazeera, Selasa kemarin.

PBB mengungkapkan, hampir separuh dari total kasus penyerangan pemukim Yahudi kepada warga Palestina, terjadi dengan pendampingan atau pengawasan pasukan Israel. Meningkatkan kekerasan pemukim sejak 7 Oktober 2023 lalu telah memaksa setidaknya 905 warga Palestina meninggalkan rumah mereka, seperti di Perbukitan Hebron Selatan dan di Wadi al-Seeq dekat Ramallah. Menurut PBB, jumlah tersebut mencakup 111 rumah tangga dan 356 anak.

Selain kekerasan pemukim Yahudi, operasi penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat juga melonjak sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menurut laporan kantor berita Palestina, Wafa, hingga Selasa (7/11) kemarin, sebanyak 163 warga Palestina dibunuh pasukan Israel. **ans**

Tiongkok Minta Negara-negara Besar Adil dan Objektif dalam Tangani Krisis Kemanusiaan di Gaza

BEIJING (IM) - Pemerintah Tiongkok meminta negara-negara besar mengambil posisi objektif terkait perang yang saat ini tengah berlangsung di Jalur Gaza. Beijing menegaskan, mereka berpegang teguh pada solusi dua negara untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan sebagai penyandang presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini, Tiongkok terus bekerja sama dengan para pihak terkait untuk dapat menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Beijing, ungkap Wang, juga akan berusaha meredakan krisis kemanusiaan yang kian memburuk di wilayah tersebut.

“Komunitas internasional perlu mengambil tindakan segera. Negara-negara di luar kawasan, terutama negara-negara besar, perlu mengambil posisi yang objektif dan adil serta memainkan peran konstruktif dalam meredakan krisis,” kata Wang dalam

pengarahan pers, Selasa (7/11), dikutip laman resmi Kemlu Tiongkok.

Pada kesempatan itu, dia kembali menyampaikan bahwa Tiongkok mendukung perdamaian langgeng antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara. “Mengenal konflik Israel-Palestina, Tiongkok tetap berpihak pada perdamaian, kestetaraan, dan keadilan,” ucapnya.

Pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas yang mengontrol Gaza telah berlangsung selama sebulan. Hingga Selasa lalu, jumlah warga Gaza yang terbunuh sejak dimulainya agresi Israel ke Gaza telah mencapai 10.305 jiwa. Lebih dari 4.200 di antaranya adalah anak-anak. Sementara korban luka melampaui 25 ribu orang.

Dewan Keamanan PBB yang diharapkan dapat menerbitkan resolusi gencatan senjata atau jeda kemanusiaan di Gaza masih terus menghadapi kebutuhan.

Dalam konteks ini, sejumlah rancangan resolusi yang diajukan selalu diveto oleh negara anggota tetap. **ans**